



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 29 Juni 2026

Halaman: 4

TAJUK

Bisa Menjadi Cerminan Masa Depan, Segera Atasi Masalah Permukiman Kumuh

Luas kawasan kumuh di DIY mencapai ratusan hektare. Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan luasan terbesar, disusul Gunungkidul, Kulonprogo, Kota Jogja, dan Sleman.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota wajib terus mempercepat penanganan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur permukiman sekaligus upaya pencegahan agar kawasan yang telah ditata tidak kembali kumuh. Hanya saja, keterbatasan anggaran,

pembagian kewenangan, dan legalitas lahan masih menjadi kendala utama.

Pemda DIY serta pemerintah kabupaten dan kota perlu memprioritaskan penataan kawasan kumuh sebelum dampaknya semakin parah. Kawasan kumuh merupakan jenis masalah yang jika dibiarkan, maka jangkauannya akan semakin melebar. Masalah ini juga jenis yang perlu intervensi dari pemerintah, mengingat besarnya anggaran serta aturan yang berlapis.

Dalam teknisnya, Pemda

DIY perlu menyinergikan penanganan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Setiap wilayah perlu jenis penanganan yang berbeda dari sisi tingkatannya. Misalnya kawasan kumuh masih tergolong kecil, maka cukup di tingkat kabupaten/kota. Akan tetapi jika jangkauannya sudah luas, maka pemerintah pusat perlu turun tangan.

Meski tentu saja dalam menangani kawasan kumuh ini, kendala utama berupa anggaran yang serba terbatas. Belum lagi masalah

efisiensi dan sejenisnya.

Pemerintah perlu memutar otak, dengan menggandeng banyak pihak, termasuk swasta dan swadaya warga. Swasta bisa berkontribusi memberikan *corporate social responsibility* (CSR) untuk program yang selaras dengan penanganan kawasan kumuh. Banyak perusahaan swasta di DIY, maka perlu adanya wadah pengelolaan CSR, agar penyalurannya terarah.

Jangan lupa juga gerakan atau inisiatif warga. Contohnya gerakan patungan Rp2.000 dari

warga Gajah Wong, Kota Jogja, yang berhasil

merenovasi beberapa rumah. Praktik baik ini bisa direplikasi dengan kearifan lokal masing-masing wilayah.

Penanganan kawasan kumuh bukan hanya tentang visual yang semakin rapi atau sejenisnya. Lebih esensial dari itu, penataan kawasan kumuh erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia, tentang kesehatan, pendidikan, hingga kondisi psikologis. Generasi saat ini maupun yang akan datang perlu tinggal di kawasan yang

sehat secara fisik, psikis, hingga visual.

Permukiman menjadi ruang tempat manusia banyak menghabiskan waktunya. Ruang tempat keluarga bernaung perlu menunjang setiap proses pertumbuhan.

Akumulasi kualitas hidup yang baik saat ini, harapannya bisa menciptakan generasi yang tidak hanya sehat fisik dan psikis, namun juga semakin memajukan peradaban. Kondisi keluarga dan permukiman, bisa menjadi cerminan masa depan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005